

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN SECARA MAKRO DI LIMA BELAS PROVINSI TAHUN 2007

Agung Eddy Suryo Saputro (agung_pegoye@yahoo.co.id)
Agung Priyo Utomo
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

ABSTRACT

One factor which influences the success of poverty alleviation program is to determine where the poverty is concentrated. There are 15 provinces that have a value index of poverty depth (P1) higher than the value of P1 Indonesia. This study will describe the characteristics of poverty in 15 provinces; identify key factors affecting poverty at the macro level; and the relationship between each of the major factors in P1. Based on factor analysis obtained there are three main factors that characterize the 15 poor provinces, which are employment, education, and residence. Logistic regression analysis showed the relationship between employment factors and education with the negative P1. Both employment and educational factors have a significant effect on P1. Meanwhile, factor of residence was positively related to P1 but the effect is not significant.

Key words: factor analysis, logistic regression analysis, poverty at the macro level, poverty depth index (P1)

“Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pada akhirnya, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka” (BPS, 2008a).

“Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih tergabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut, antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor" (BPS, 2008b).

Dalam kaitannya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah Indonesia telah memberikan 3 paket bantuan program. Ketiga paket bantuan program tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Paket Bantuan Program I: Bantuan dan Perlindungan Sosial
Paket bantuan ini ditujukan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Paket ini diwujudkan dalam bentuk Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas yang dulu disebut Askeskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PKH (Program Keluarga Harapan), dan BLT (Bantuan Langsung Tunai).
2. Paket Bantuan Program II: Pemberdayaan Masyarakat
Paket bantuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas partisipasi, kesempatan kerja dan berusaha, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perumahan.
3. Paket Bantuan Program III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK-KUR)
Paket bantuan ini bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas kesempatan berusaha dan bekerja, sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Salah satu prasyarat keberhasilan program-program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan mengidentifikasi target grup dan target area. Keberhasilan program pengentasan nasib orang miskin tergantung pada langkah awal dari formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasi siapa sebenarnya yang miskin dan di mana penduduk miskin itu berada. Kedua pertanyaan tersebut, dapat dijawab dengan melihat kemiskinan secara mikro (mengidentifikasi siapa sebenarnya yang miskin) dan melalui profil kemiskinan (mengetahui di mana penduduk miskin berada). Kemiskinan secara mikro dapat didekati dengan 14 variabel yang telah ditentukan oleh BPS. Empat belas variabel tersebut berguna untuk menentukan kriteria rumah tangga miskin. Profil kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik ekonominya, sosial budaya, dan demografinya. Pertanyaan kedua mengenai penyebaran kemiskinan dapat dilihat dari karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan di mana penduduk miskin terkonsentrasi.

Penggunaan terpenting dari profil kemiskinan adalah untuk mendukung usaha-usaha bagi penentuan sasaran sumber daya pembangunan terhadap wilayah miskin, yang bertujuan menurunkan kemiskinan secara makro melalui sasaran wilayah geografis. Wilayah mana yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam penentuan sasaran? Sementara, pertanyaan ini hanya dapat dijawab pada tingkat makro dengan data survei, karena terbatasnya cakupan geografis yang terkena sampel.

Jadi, hasil survei memberikan pemahaman yang luas tentang orientasi kebijakan yang semestinya dalam menentukan sasaran wilayah. Hasil survei sebenarnya masih bersifat terbatas dalam penentuan penempatan intervensi proyek secara geografis. Bagaimanapun juga, angka kemiskinan secara makro yang dihasilkan dari survei tersebut masih dapat digunakan secara luas bagi penentuan sasaran.

Pemetaan kemiskinan secara makro bertujuan untuk menggambarkan keragaman kemiskinan dalam suatu negara, yaitu wilayah mana yang lebih sejahtera dan wilayah mana yang kurang sejahtera. Terkadang wilayah yang mempunyai tingkat kemiskinan secara makro yang lebih rendah, mungkin mempunyai kantong-kantong kemiskinan yang besar dan tidak tercermin dalam statistik kemiskinan secara makro.

Pemetaan kemiskinan secara makro dalam penelitian ini didasarkan pada nilai indeks kedalaman kemiskinan (P_1). Alasan menggunakan P_1 karena indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin. P_1 merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan secara makro, semakin tinggi nilai indeks ini akan menyebabkan rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin semakin besar. Menurut *World Bank Institute* tahun 2002, P_1 sebagai biaya mengentaskan kemiskinan karena indikator ini menunjukkan berapa banyak uang yang akan ditransfer kepada penduduk miskin untuk membawa pengeluaran penduduk miskin mencapai garis kemiskinan.

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Tahun 2007 per Provinsi di Indonesia

Provinsi	2007	Provinsi	2007
Papua Barat	12,97	Jawa Barat	2,26
Papua	10,84	Maluku Utara	2,23
Maluku	6,38	Riau	2,18
Gorontalo	5,57	Sumatera Utara	2,17
NAD	5,41	Kepulauan Riau	1,90
Nusa Tenggara Barat	5,13	Jambi	1,88
Nusa Tenggara Timur	4,87	Sulawesi Utara	1,88
Sulawesi Tengah	4,46	Sumatera Barat	1,84
Sulawesi Tenggara	4,33	Kalimantan Timur	1,81
Bengkulu	4,03	Kalimantan Barat	1,79
Lampung	3,94	Bangka Belitung	1,68
Jawa Timur	3,91	Kalimantan Tengah	1,68
Sumatera Selatan	3,84	Banten	1,40
Jawa Tengah	3,84	Bali	0,94
DI Yogyakarta	3,80	Kalimantan Selatan	0,81
Sulawesi Selatan	2,60	DKI Jakarta	0,59
Sulawesi Barat	2,59	Indonesia	2,99

Sumber: BPS. Diolah dari Susenas Modul Konsumsi tahun 2007

Informasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat pada tahun 2007 mempunyai nilai P_1 terbesar dibandingkan 32 provinsi lainnya, yaitu sebesar 12,97. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai P_1 terkecil dibandingkan 32 provinsi lainnya, yaitu sebesar 0,59. Indonesia mempunyai nilai P_1 sebesar 2,99.

Pada tahun 2007 ada 15 provinsi dengan nilai P_1 yang lebih tinggi daripada nilai P_1 Indonesia. Kelima belas provinsi tersebut, yaitu: Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku, Gorontalo, Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Mengapa nilai P_1 yang melebihi nilai P_1 Indonesia hanya terjadi di 15 provinsi dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi nilai P_1 di 15 provinsi tersebut sehingga memiliki nilai P_1 yang

melebihi nilai P_1 Indonesia pada tahun 2007? Pertanyaan inilah yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 15 provinsi tersebut dan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi nilai P_1 di 15 provinsi tersebut.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut.

Bagaimana gambaran karakteristik penduduk miskin di 15 provinsi?

Faktor-faktor utama apa saja yang memengaruhi kemiskinan secara makro di 15 provinsi?

Bagaimana hubungan antara setiap faktor utama dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1)?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Menggambarkan karakteristik penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007.

Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kemiskinan secara makro di 15 provinsi.

Mengetahui hubungan antara setiap faktor utama dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1).

“Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang digunakan BPS, sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul *Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia*. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan tidak langsung, seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down-effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Penentuan masing-masing kebutuhan dasar mengalami kesulitan karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumsi terhadap suatu jenis makanan atau komoditas lainnya” (BPS, 2008a).

Beberapa teori yang mendukung penelitian ini, yaitu:

a. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse

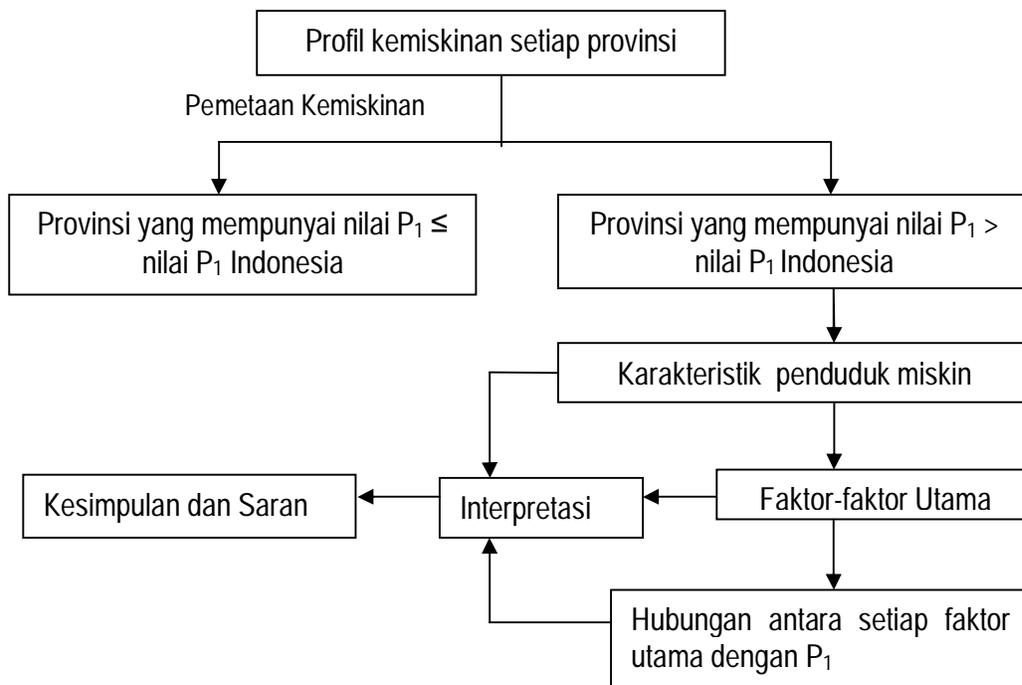
Menurut Ragnar Nurkse, teori Lingkaran Setan Kemiskinan menjelaskan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin, karena produktivitasnya rendah, yang mengakibatkan penghasilan penduduk rendah, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minimum sehingga tidak dapat menabung (tabungan merupakan sumber utama pembentukan modal masyarakat).

b. Teori Perangkap Kemiskinan oleh Malthus

Teori Malthus, menunjukkan bahwa suatu saat pertumbuhan jumlah penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan. Ketika keadaan ini terjadi akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin.

Pemetaan pada profil kemiskinan setiap provinsi di Indonesia berguna untuk melihat di provinsi mana penduduk miskin akan terkonsentrasi. Pemetaan kemiskinan dengan menggunakan nilai P_1 Indonesia akan menghasilkan 2 kelompok provinsi, yaitu: kelompok provinsi yang mempunyai nilai P_1 di atas nilai P_1 Indonesia dan kelompok provinsi yang mempunyai nilai P_1 di bawah atau sama dengan nilai P_1 Indonesia. Penelitian ini akan menggambarkan karakteristik penduduk miskin pada kelompok provinsi yang mempunyai nilai P_1 di atas nilai P_1 Indonesia. Setiap karakteristik terdiri dari beberapa variabel kemiskinan makro. Variabel-variabel kemiskinan tersebut akan direduksi

menjadi beberapa faktor utama yang memenuhi syarat pengujian statistik. Selanjutnya, akan dilihat hubungan antara setiap faktor utama yang terbentuk dengan P_1 . Hasil penelitian ini akan diinterpretasikan. Selanjutnya, akan dibuat kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian bahwa karakteristik pangan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan kondisi rumah tinggal berhubungan dengan P_1 .

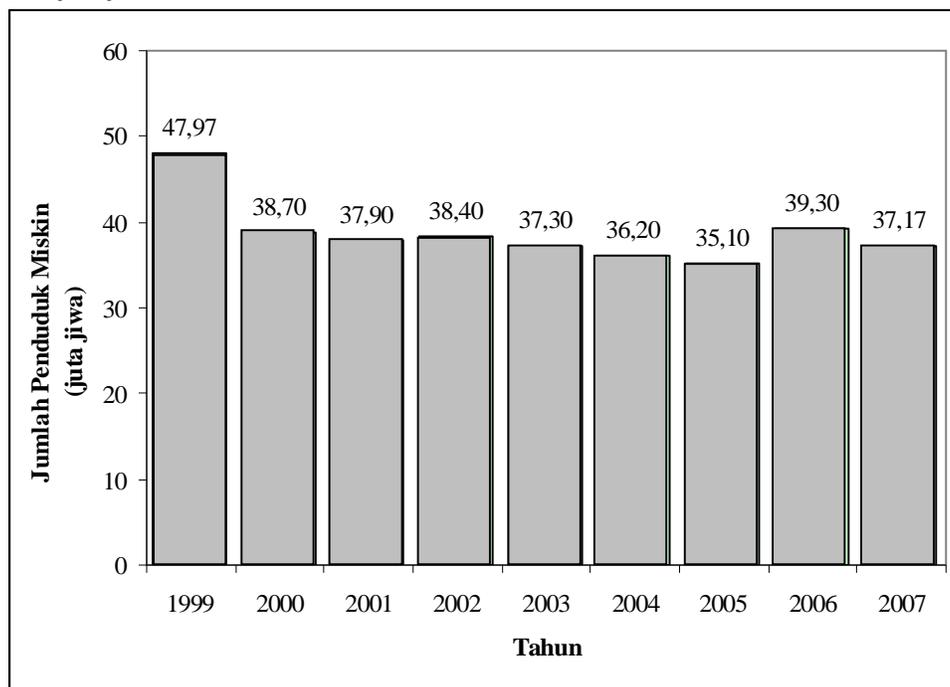
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber pada Susenas Modul Konsumsi tahun 1999 sampai tahun 2007 dan Susenas Kor tahun 2007 yang dipublikasikan oleh BPS. Susenas Modul Konsumsi berisi data yang unit analisisnya provinsi yang dipisahkan antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Susenas Kor berisi data yang unit analisisnya kabupaten/kota. Susenas Kor Juli 2007 di *deflate* ke posisi Maret 2007 agar data kemiskinan tingkat kabupaten/kota mempunyai referensi waktu yang sama dengan data kemiskinan tingkat nasional dan provinsi. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 19 variabel.

Penelitian ini akan menggambarkan karakteristik penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 dengan menampilkan tabel dan gambar (grafik ataupun diagram) serta interpretasinya. Analisis Komponen Utama (AKU) dan analisis faktor digunakan untuk mereduksi variabel dan membentuk faktor utama, sedangkan analisis regresi logistik digunakan untuk melihat hubungan antara setiap faktor utama dengan P_1 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Secara Makro di Indonesia Periode 1999-2007

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 1999-2007 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun dan ada kecenderungan menurun dari 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 37,17 juta jiwa pada tahun 2007. Pada periode 1999-2007 terjadi 2 kali peningkatan jumlah penduduk miskin, yaitu pada periode 2001-2002 sebesar 500.000 jiwa dan periode 2005-2006 sebesar 4,20 juta jiwa.



Sumber: BPS, diolah dari data Susenas Modul Konsumsi tahun 1999-2007

Gambar 2. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 1999-2007

Berdasarkan informasi pada Gambar 2, jumlah penduduk miskin tahun 2007 sebesar 37,17 juta jiwa. Periode waktu yang digunakan BPS untuk menghitung jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah Maret 2006 – Maret 2007. Pada periode 2006-2007 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, hal ini dikarenakan pada periode tersebut sebagian besar program pengentasan kemiskinan dari pemerintah dianggap cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Karakteristik Penduduk Miskin di Lima Belas Provinsi Tahun 2007

Berdasarkan kelima karakteristik sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 cenderung mengeluarkan pendapatannya yang masih rendah untuk konsumsi makanan, sehingga biaya pendidikan, kesehatan, dan rumah tinggal kurang mendapatkan perhatian. Sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi cenderung berpendidikan rendah (SD dan SLTP), sehingga penduduk miskin tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal.

Meskipun nilai APS (umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun) dan angka melek huruf cukup tinggi tetapi tidak cukup membantu penduduk miskin di 15 provinsi untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Pendidikan yang rendah menyebabkan sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal. Hal ini dikarenakan pekerjaan di sektor pertanian dan pekerjaan informal tidak mensyaratkan harus berpendidikan tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan pendapatan sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi cenderung rendah.

Mahalnya biaya tenaga kesehatan moderen menyebabkan sebagian penduduk miskin di 15 provinsi cenderung menggunakan tenaga kesehatan tradisional yang lebih murah daripada tenaga kesehatan moderen. Sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi tidak menggunakan KB. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk meningkat sehingga penduduk miskin yang bekerja mendapat tambahan beban tanggungan.

Penggunaan air bersih dan kepemilikan jamban di 15 provinsi masih sangat rendah, hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk miskin mudah terserang penyakit sehingga penduduk miskin tersebut harus mengeluarkan biaya kesehatan. Jadi, setiap karakteristik kemiskinan penduduk miskin di 15 provinsi tersebut saling berkaitan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Secara Makro di Lima Belas Provinsi Tahun 2007

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan diperoleh dengan cara mereduksi 18 variabel yang telah diidentifikasi. Setelah dilakukan penilaian kelayakan variabel dengan cara menguji hipotesis yang menyatakan bahwa antar variabel asal tidak berkorelasi, langkah berikutnya adalah menguji tingkat kelayakan data untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan proses analisis selanjutnya. Berikut hasil pengujian kelayakan apakah data dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 2. KMO and Bartlett's Test(a)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.824
	Approx. Chi-Square	6096.457
Bartlett's Test of Sphericity	Df	153
	Sig.	.000

a Based on correlations

Berdasarkan informasi pada Tabel 2, diketahui nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) sebesar 0,824 (lebih besar dari 0,50) yang menunjukkan bahwa data baik untuk dianalisis lebih lanjut dengan AKU maupun analisis faktor. Nilai *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar 6096,457 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel tidak berkorelasi ditolak pada tingkat signifikansi 5%, berarti variabel-variabel tersebut memang berkorelasi.

Langkah selanjutnya, melihat nilai MSA pada setiap variabel yang dianalisis. Nilai MSA ini dapat dilihat pada tabel *anti-image correlation*, nilai MSA ditunjukkan pada diagonal *anti-image correlation*. Nilai MSA ini berguna untuk mengetahui apakah sebuah variabel sudah memiliki kecukupan observasi, agar dapat dilanjutkan dengan AKU. Delapan belas variabel yang diteliti mempunyai nilai MSA > 0,50, sehingga 18 variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Berdasarkan informasi tabel *Communalities*, komponen utama yang terbentuk mampu menjelaskan keragaman semua variabel asal dengan proporsi yang cukup besar. Variabel persalinan

anak pertama mempunyai komunalitas yang paling besar dibandingkan 17 variabel lainnya, yaitu sebesar 0,966. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 96,60% keragaman variabel persalinan pertama dapat dijelaskan oleh KU yang terbentuk. Variabel KB mempunyai nilai komunalitas terkecil, yaitu sebesar 0,043. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 4,30% keragaman variabel KB yang dapat dijelaskan oleh KU yang terbentuk.

Tabel *Total Variance Explained* menunjukkan jumlah KU yang terbentuk. Delapan belas variabel asal direduksi menjadi 3 KU. Ketiga KU tersebut mampu secara bersama-sama menerangkan persentase keragaman total variabel asal sebesar 82,997%. Menurut Johnson (2002), jumlah KU yang dipilih sudah cukup memadai jika jumlah KU tersebut mempunyai persentase keragaman kumulatif tidak kurang dari 80% total keragaman nilai-nilai dari variabel asal.

Ketiga KU yang terbentuk menghasilkan *loading factor* yang sudah tidak berkorelasi satu sama lain dan nilai-nilainya merupakan koefisien korelasi antar variabel asal dengan KU tersebut. Hasil pengolahan yang dihasilkan belum dapat digunakan untuk menentukan variabel asal mana yang masuk ke dalam masing-masing KU.

Variabel-variabel asal yang dominan pada masing-masing KU (selanjutnya disebut faktor utama) dilakukan rotasi pada matriks *loading factomya*. Proses rotasi pada penelitian ini menggunakan rotasi *varimax*. Variabel asal dominan mempunyai rotasi yang relatif kuat dengan faktor utama yang disusunnya.

Tabel 3. Rotated Component Matrix

Variabel	Komponen		
	1	2	3
TidakTamatSD	-0,335	-0,592	-0,218
SLTP	0,074	0,548	0,103
SLTA	0,496	0,293	0,211
TidakBekerja	0,588	0,259	0,174
PekerjaInformal	-0,871	-0,345	-0,070
PekerjaFormal	0,846	0,328	0,041
PekerjaPertanian	-0,929	-0,272	-0,136
PekerjaBukanPertanian	0,933	0,272	0,117
KonsumsiMakanan	-0,565	-0,353	-0,266
AngkaMelek15smp24	0,205	0,488	0,145
AngkaMelek15smp55	0,203	0,485	0,118
APS7smp12	0,221	0,500	0,139
APS13smp15	0,245	0,511	0,119
PersalinanPertama	0,406	0,887	0,121
PersalinanTerakhir	0,416	0,881	0,104
KB	0,134	0,133	-0,086
AirBersih	0,546	0,213	0,578
JambanSendiri	0,146	0,451	0,814

Berdasarkan nilai *loading factor* hasil rotasi, setiap faktor utama dapat diinterpretasikan sebagai berikut dengan ketentuan variabel asal akan masuk ke sebuah faktor utama berdasarkan nilai korelasinya yang terbesar (tanda positif atau negatif diabaikan).

- a. Faktor utama pertama berkorelasi cukup tinggi dengan variabel tidak bekerja, status pekerjaan informal, status pekerjaan formal, pekerjaan sektor pertanian, pekerjaan sektor bukan pertanian, dan pengeluaran per kapita untuk makanan. Meskipun, variabel berpendidikan minimal SLTA dan KB tidak berkorelasi tinggi dengan faktor utama pertama tetapi karena kontribusi kedua variabel tersebut paling besar untuk faktor utama pertama dibandingkan kontribusi kedua variabel tersebut terhadap faktor utama lainnya, maka kedua variabel tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam faktor utama pertama. Lima variabel dari delapan variabel asal yang memberikan kontribusi terbesar merupakan karakteristik ketenagakerjaan, maka faktor utama pertama dinamakan faktor pekerjaan.

Faktor utama kedua yang terbentuk berkorelasi cukup tinggi dengan variabel tidak tamat SD, APS, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Meskipun, variabel angka melek huruf tidak berkorelasi tinggi dengan faktor utama kedua tetapi karena kontribusi variabel tersebut paling besar untuk faktor utama kedua dibandingkan kontribusi variabel tersebut terhadap faktor utama lainnya, maka variabel tersebut tetap akan dimasukkan ke dalam faktor utama kedua. Enam variabel dari delapan variabel asal pembentuk faktor utama kedua merupakan karakteristik pendidikan, maka faktor utama kedua dinamakan faktor pendidikan.

Faktor utama ketiga yang terbentuk berkorelasi cukup tinggi dengan variabel air bersih dan kepemilikan jamban. Kedua variabel asal tersebut memberikan sumbangan relatif besar dalam membangun faktor utama ketiga dibandingkan dengan variabel asal yang lain. Oleh karena itu, faktor utama ketiga dinamakan faktor rumah tinggal.

Hubungan Antara Setiap Faktor Utama dengan P₁ Tahun 2007

Variabel respon akan bernilai 1 jika nilai P₁ kabupaten/kota melebihi nilai P₁ Indonesia (2,99) dan akan bernilai 0 jika nilai P₁ kabupaten/kota kurang dari samadengan nilai P₁ Indonesia. Variabel penjelas yang akan digunakan adalah faktor-faktor utama yang terbentuk, yaitu: faktor pekerjaan, faktor pendidikan, dan faktor rumah tinggal.

Taraf nyata yang digunakan dalam uji signifikan model dan uji parameter adalah 0,05. Pada uji signifikan model jika nilai signifikan lebih kecil atau samadengan 0,05 maka dikatakan model tersebut sudah tepat atau sesuai. Selain itu, tingkat signifikan juga dapat dilihat melalui nilai statistik G² yang dibandingkan dengan χ^2_{tabel} . Jika nilai statistik G² lebih besar dari nilai χ^2_{tabel} , maka model tersebut dikatakan sudah tepat karena paling sedikit ada satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap variabel respon dalam model. Pada uji parameter model, jika nilai signifikan suatu variabel lebih kecil atau samadengan 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh secara nyata terhadap model.

Metode yang digunakan adalah metode *enter*. Penelitian ini menggunakan faktor-faktor utama sebagai variabel penjelas. Jika ada faktor utama yang tidak signifikan memengaruhi variabel respon, maka faktor utama tersebut tidak dihilangkan, tetapi tetap digunakan dalam model dan tujuan dari penelitian ini melihat hubungan antara setiap faktor utama dengan P₁. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,484 menjelaskan bahwa ketiga faktor utama dapat menjelaskan P₁ sebesar 48,4% dan 51,16% dijelaskan oleh selain ketiga faktor utama.

Uji G² sebesar 97,962 dan lebih besar dari χ^2_{tabel} (7,81). Keputusan tolak H₀, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu faktor utama yang berpengaruh secara signifikan terhadap P₁. Nilai *likelihood* ini dapat dilihat pada tabel *Omnibus Test of Model Coefficients*.

Uji *Wald* menunjukkan bahwa hanya faktor pekerjaan dan faktor pendidikan yang signifikan berpengaruh terhadap P_1 sedangkan faktor rumah tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap P_1 , tetapi faktor rumah tinggal tetap akan dimasukkan dalam model.

Tabel 4. Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a)	FAC1_1	-1.319	.202	42.541	1	.000	.268
	FAC2_1	-1.327	.238	30.999	1	.000	.265
	FAC3_1	.036	.184	.039	1	.843	1.037
	Constant	.977	.205	22.707	1	.000	2.656

a Variable(s) entered on step 1: FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1.

dimana:

FAC1_1 = faktor pekerjaan

FAC2_1 = faktor pendidikan

FAC3_1 = faktor rumah tinggal

Berdasarkan informasi Tabel 4, akan diperoleh persamaan peluang regresi logistik sebagai berikut.

$$\pi(x_i) = \frac{\exp(0,977 - 1,319F_1 - 1,327F_2 + 0,036F_3)}{1 + \exp(0,977 - 1,319F_1 - 1,327F_2 + 0,036F_3)}$$

Sehingga transformasi *logit* dari persamaan peluang regresi logistik di atas adalah

$$g(x_i) = 0,977 - 1,319F_1 - 1,327F_2 + 0,036F_3$$

Nilai koefisien faktor pekerjaan yang negatif menunjukkan bahwa hubungan faktor pekerjaan dengan P_1 adalah negatif. Jika nilai faktor pekerjaan meningkat akan menyebabkan peluang P_1 akan menurun dan mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa nilai P_1 akan berpeluang besar mempunyai nilai di bawah atau samadengan nilai P_1 Indonesia. Nilai peluang P_1 yang menurun ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 cenderung mengalami peningkatan pengeluaran sehingga keadaan penduduk miskin tersebut cenderung lebih baik daripada keadaan sebelumnya.

Nilai koefisien faktor pendidikan yang negatif menunjukkan bahwa hubungan faktor pendidikan dengan P_1 adalah negatif. Jika nilai faktor pendidikan meningkat akan menyebabkan peluang P_1 akan menurun dan mendekati nol, hal ini menunjukkan bahwa nilai P_1 akan berpeluang besar mempunyai nilai di bawah atau sama dengan nilai P_1 Indonesia. Nilai peluang P_1 yang menurun ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi tahun 2007 cenderung mengalami peningkatan pengeluaran sehingga keadaan penduduk miskin tersebut cenderung lebih baik daripada keadaan sebelumnya.

Nilai koefisien faktor rumah tinggal yang positif menunjukkan bahwa hubungan faktor rumah tinggal dengan P_1 adalah positif. Jika nilai faktor rumah tinggal meningkat akan menyebabkan peluang P_1 akan meningkat dan mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa nilai P_1 akan berpeluang besar mempunyai nilai di atas P_1 Indonesia. Nilai peluang P_1 yang meningkat ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi tahun 2007 cenderung mengalami penurunan pengeluaran sehingga keadaan penduduk miskin tersebut cenderung lebih buruk dari keadaan sebelumnya.

Faktor rumah tinggal ini berlawanan dengan teori, tetapi berdasarkan uji parsial faktor rumah tinggal ini tidak signifikan memengaruhi P_1 . Oleh karena itu, *anomali* yang terjadi pada faktor rumah tinggal terhadap P_1 dalam penelitian ini tidak akan dipermasalahkan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 1999-2007 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun dan ada kecenderungan menurun dari 47,97 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 37,17 juta jiwa pada tahun 2007.
2. Pada tahun 1999 nilai P_1 cenderung menurun dari 4,33 menjadi 2,99 pada tahun 2007, akan tetapi selama periode 1999-2007 nilai P_1 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 pengeluaran sebagian besar penduduk miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 1999.
3. Karakteristik-karakteristik penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007, antara lain: karakteristik pangan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan rumah tinggal.
4. Sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 cenderung memiliki ciri-ciri seperti: pengeluaran per kapita untuk makanan lebih besar daripada pengeluaran per kapita untuk non-makanan, pendidikan masih rendah, bekerja di sektor pertanian, status pekerjaan informal, ada yang tidak bekerja, belum menggunakan tenaga kesehatan modern untuk persalinan anak pertama maupun persalinan anak terakhir, belum menggunakan alat KB, tidak menggunakan air bersih, dan tidak memiliki jamban.
5. Sebagian besar penduduk miskin di 15 provinsi pada tahun 2007 menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi makanan sehingga pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan rumah tangga kurang mendapatkan perhatian. Pendidikan yang rendah mengakibatkan penduduk miskin tidak dapat bersaing dengan penduduk tidak miskin untuk bekerja pada pekerjaan formal sehingga penduduk miskin cenderung tidak bekerja atau memilih bekerja di sektor pertanian, dan bekerja dengan status pekerjaan informal.
6. Delapan belas variabel asal yang mewakili kelima karakteristik kemiskinan penduduk miskin dapat direduksi menjadi 3 faktor utama. Ketiga faktor utama tersebut adalah faktor pekerjaan, faktor pendidikan, dan faktor rumah tinggal.
7. Hubungan antara P_1 dengan faktor pekerjaan dan faktor pendidikan adalah negatif. Sedangkan hubungan P_1 dengan faktor rumah tinggal adalah positif. Berdasarkan hasil penelitian faktor rumah tinggal tidak signifikan memengaruhi nilai P_1 .

Beberapa saran yang akan diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah diharapkan menurunkan biaya pendidikan, memperbanyak lapangan pekerjaan formal dan sektor bukan pertanian yang bersifat padat karya. Pemerintah diharapkan menjaga harga bahan makanan agar tetap stabil dan akan lebih baik jika harga bahan makanan turun. Pemerintah sebaiknya lebih bersosialisasi kepada penduduk miskin tentang KB.
2. Pemerintah diharapkan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan tenaga kesehatan modern sampai daerah terpencil, menurunkan biaya tenaga kesehatan modern. Pemerintah diharapkan memperbaiki infrastruktur yang telah rusak dan menambah infrastruktur, seperti jalan di wilayah-wilayah terpencil.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2008a). *Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan tahun 2008*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2008b). *Data dan informasi kemiskinan tahun 2007, Buku 1: Provinsi*. Jakarta: BPS
- Johnson, R A. (2002). *Applied multivariate statistical analysis*. New Jersey: Prentice Hall